Radar Bali



Disdikpora-Dewan Badung Harus Transparan

BCW Dorong Kepolisian Turun Tangan

DENPASAR - Setelah sebelumnya Direkrorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar Mendikbud dan Disdispora Bali untuk menurunkan tim dan meninjau ulang status pendidikan kerjasama (BPK), mencuatnya sejumlah persoalan yang terjadi di Sekolah Lentera Kasih (SLK) Bali. Pun, kejaksaan akan mengusut dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Bali Putu Wirata Dwikora saat dikonfirmasi kemarin (7/11), menegaskan, dengan munculnya dugaan pelanggaran dalam

juga melakukan pengawasan. "Artinya harus sama-sama punya itikad, itikad yang baik. Apalagi ini soal pendidikan," tegasnya. Termasuk soal tidak transparannya sejumlah lembaga baik pihak legislatif maupun Disdikpora Badung dalam menyikapi kasus ini, menurut Putwir, seharusnya pihak lembaga maupun pemerintah bersikap transparan, "Kami melihat khususnya di wilayah perkotaan seperti Denpasar dan Badung banyak orang berebut sekolah yang baik," sebut dia. Pendidikan menjadi salah satu pangsa pasar yang bagus. Kalau kemudian terjadi hal demikian, bagaimana dengan pangsa lain di luar pendidikan. Untuk itu,

pajak bisa dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. Sehingga jangan sampai terkesan adanya tebang pilih dalam penegakkan hukum maupun pembinaan hukum khususnya perpajakan kepada sekolah-sekolah swasta yang ada di Bali," sebut dia dalam pesan singkatnya. Apalagi, SLK saat ini merupakan salah satu dari beberapa sekolah swasta SPK yang patuh membayar pajak dan terbaik di bandingkan sekolah-sekolah swasta lainnya di Bali. "Sehingga dapat memotivasi sekolah swasta lainnya untuk lebih patuh dalam pembayaran pajaknya ke negara sebagaimana telah dilakukan oleh sekolah SLK selama ini," tukas dia. (pra/hen/gup)

sistem pembayaran biaya sekolah yang sampai saat ini masih dilakukan transfer ke Perseroan Terbatas (PT) Bali Permata Hati. Putwir-sapaan Putu Wirata Dwikora juga mendesak dan mendorong pihak kepolisian melakukan penyelidikan. "Sedangkan untuk persoalan kualitas seperti yang dikeluhkan wali murid, seharusnya pihak yayasan atau sekolah sudah seharusnya berkewajiban untuk segera memenuhi dengan melakukan perbaikan,"harapnya. Kata Putwir, apakah atas keluhan wali murid sudah dilakukan atau belum, maka sebagai control, pihak Disdikpora ataupun lembaga pemerintah lain, yang berwenang mengevaluasi harusnya

guna menghindari adanya pelanggaran hukum dan adanya dugaan pelanggaran lainnya, Putwir melalui BCW mendesak, agar pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan kasus ini "Kalau kemudian ada pelanggaran pidana di sini, tentu pihak kepolisian yang paling berwenang" pungkasnya.

pihak kepolisian yang paling berwenang," pungkasnya.

Di bagian lain lewat pesan singkat, M. Ri an, Konsultan Hukum SLK Bali menyambut baik langkah BCW dan lembaga hukum lainnya untuk merertibkan dan membina sekolah-sekolah yang ada di Bali. Pun terkait pembayaran pajak, tidak terkecu ali SLK. "Mungkin masih banyak sekolah-sekolah SPK di seluruh Bali yang tidak membayar

Edisi : Minggu, & November 2015

Hal : <u>24</u>

Radar Bali



Gianyar Beli Tujuh Bus Sekolah

GIANYAR – Maraknya anak sekolah yang menggunakan motor untuk berangkat ke sekolah, yang secara tak langsung mengancam keselamatan mereka, perlahan mulai mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar. Sebab jika tak ada kendala, tahun depan Pemkab Gianyar segera memiliki bus sekolah, Trans Harmoni.

Kepala Dinas Perhubungan Informasi dar dan Komunikasi (Kadishubinfokom) Gianyar Cokorda Gde Agusnawa kemarin (8/11) menyatakan, saatini pihaknya memang tengah fokus menggarap sistem transportasi pelajar itu. Sebab akhir tahun ini proses penyediaan sarana dan prasarana, seperti bus dan halte pun tengah digarap. "Saat ini semua proses sedang berjalan. Karena sudah masuk di (APBD, Red) Perubahan 2015, maka kini sedang proses tender. Semoga saja tidak ada kendala, dan semua proses bisa berjalan lancar," harapnya.

Dia menjelaskan, pada anggaran perubahan ini, secara total ada tujuh unit bus yang akan dibeli. Nilai masing-masing bus tersebut cukup wah. Yakni, mencapai Rp 600 juta untuk satu unitnya.

"Sesuai rencana dan instruksi pimpinan, ketujuh bus itu nantinya akan kami sebar di tujuh kecamatan. Sehingga di masing-masing kecamatan, akan beroperasi satu unit bus sekolah," paparnya.

Lantaran dalam satu kecamatan hanya dilayani satu unit bus. Maka, pihaknya merencanakan bus sekolah tersebut akan bersinergi dengan angkutan umum lainnya, khususnya angkutan yang menyasar kawasan pelosok. Karena itu, selain pengadaan bus yang tengah dalam proses, pihaknya juga mematangkan koordinasi dengan pihak Organda.

"Untuk ketersediaan halte, belum bisa saya rinci jumlahnya sekarang. Intinya halte-halte itu nanti akan ditempatkan dekat sekolah, serta di tempat umum yang memang lokasinya strategis sebagai perlintasan bus," bebernya.

Selain menyiapkan bus dan halte. Dia menyatakan, Trans Harmoni ini dalam operasionalnya direncanakan bakal tidak dipungut biaya, alias gratis bagi para pelajar. Sebab sesuai rencana sistem transportasi itu dalam operasionalnya akan disubsidi Pemkab Gianyar. (wid/djo)

Edisi : Senin, 9 November 2015

Hal. : 25